

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 42-48
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531706>

Multikultural Pada Masa Khulafaurasyidin

Muhammad Asri¹, Meyniar Albina²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: muhammadasriramadhan76@gmail.com, meyniaralbina@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan konsep multikulturalisme pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mencakup kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh para khalifah dalam menghadapi keberagaman masyarakat di bawah kepemimpinan mereka. Penelitian ini mengkaji aspek sosial, politik, dan agama yang membentuk pendekatan multikultural pada masa tersebut, serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat yang beragam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder yang mencakup teks-teks sejarah Islam dan karya-karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin, seperti toleransi beragama, distribusi kekuasaan yang merata, dan penghargaan terhadap budaya lokal, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip multikulturalisme yang efektif, meskipun tantangan tetap ada. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana pluralitas dapat dikelola dengan bijaksana dalam konteks kekuasaan.

Kata Kunci: Multikulturalisme, Khulafaur Rasyidin, Keberagaman

Abstract

Recruitment This research aims to examine and analyze the application of the multicultural concept during the period of the Khulafaur Rasyidin, focusing on the policies implemented by the caliphs in addressing the diversity of the society under their leadership. The study explores the social, political, and religious aspects that shaped the multicultural approach during this era, as well as its implications on the life of the diverse society. The research adopts a library reseacrh method. Data was collected through literature study from various primary and secondary sources, including Islamic historical texts and related scholarly works. The findings indicate that the policies of the Khulafaur Rasyidin, such as religious tolerance, equitable power distribution, and respect for local cultures, demonstrated effective implementation of multicultural principles, although challenges existed. This study contributes to understanding how pluralism can be wisely managed within the context of power.

Keywords: Multiculturalism, Khulafaur Rasyidin, Diversity

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Multikulturalisme merupakan konsep yang sangat relevan dalam memahami sejarah dan perkembangan Islam. Multikulturalisme menekankan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, etnis, serta pandangan hidup dalam suatu masyarakat. Beberapa referensi menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme dan toleransi (Al-Hikami, 2023). Pada masa Dinasti Abbasiyah, konsep pendidikan Islam multikultural telah diterapkan dengan baik. Masyarakat Madinah yang plural didukasi oleh Nabi Muhammad melalui nilai-nilai ajaran Islam yang universal. Keteladanan Nabi Muhammad dengan akhlakunya yang universal menjadi modal penting terwujudnya sikap toleransi dalam menyikapi multikulturalisme masyarakat Madinah (Herawati et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai multikulturalisme Islam juga sangat relevan untuk diterapkan. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai varian ras, suku, agama, dan budaya menjadi lahan yang subur untuk mengimplementasikan konsep multikulturalisme Islam. Hal ini sejalan dengan konsep Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* yang menekankan kasih sayang terhadap seluruh alam (Sugiarto, 2023).

Pada masa perkembangan Islam, terutama di era Khulafaur Rasyidin, nilai-nilai multikultural telah hadir dan diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi umat Islam. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam sistem tribalistik yang mengutamakan

kesetiaan pada suku dan kabilah masing-masing, sehingga konflik antarsuku seringkali terjadi. Kehadiran Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW membawa perubahan besar dengan menanamkan prinsip persatuan, keadilan, dan toleransi yang melampaui sekat-sekat kesukuan. Prinsip ini kemudian diwariskan dan dilanjutkan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa Khulafaur Rasyidin menjadi periode penting dalam sejarah Islam karena mencerminkan bagaimana kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan inklusif berhasil mengelola keberagaman masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan agama (Setiawan, 2023).

Penerapan nilai-nilai multikultural pada masa Khulafaur Rasyidin dapat dilihat dari kebijakan para khalifah dalam mengelola wilayah-wilayah taklukan yang multietnis dan multireligius. Misalnya, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kebijakan tentang perlindungan Ahlul Dzimmah menunjukkan bentuk toleransi dan penghargaan terhadap hak-hak non-Muslim. Umar tidak hanya memberikan kebebasan beragama, tetapi juga menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka selama mereka tunduk pada hukum yang berlaku. Selain itu, sistem administrasi dan pemerintahan yang diterapkan pada masa itu menunjukkan sikap inklusif dan keadilan sosial, di mana setiap kelompok masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan peradaban Islam. Hal ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi dunia modern saat ini, di mana isu keberagaman sering kali menjadi pemicu konflik sosial dan politik (Yani et al., 2020). Dengan menelaah kebijakan multikultural pada masa Khulafaur Rasyidin, kita dapat memahami bagaimana Islam membangun tatanan masyarakat yang harmonis berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Di tengah situasi global saat ini yang diwarnai oleh berbagai konflik akibat perbedaan agama, suku, dan budaya, konsep multikulturalisme pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi sangat relevan untuk dikaji. Pemahaman terhadap sejarah ini dapat memberikan inspirasi dan solusi konkret dalam membangun harmoni di tengah keberagaman. Berbagai tantangan seperti diskriminasi, intoleransi, dan perpecahan dapat diminimalisir dengan meneladani kepemimpinan para khalifah yang mengutamakan persatuan umat serta keadilan dalam mengelola perbedaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang penerapan nilai-nilai multikultural pada masa Khulafaur Rasyidin, faktor pendukung keberhasilan penerapan nilai-nilai tersebut, serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan masyarakat pada saat itu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi pedoman untuk membangun masyarakat multikultural yang harmonis, adil, dan sejahtera di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur jurnal penelitian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masa Khulafaur Rasyidin dan konsep multikulturalisme. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis berbagai kebijakan, peristiwa, serta dinamika sosial pada masa tersebut untuk memahami bagaimana nilai-nilai multikultural diterapkan dan dijalankan. Teknik ini membantu peneliti untuk menggali informasi mendalam dari sumber primer maupun sekunder secara sistematis guna mendeskripsikan dan menganalisis fenomena multikultural pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Multikultural pada Masa Khulafaur Rasyidin

Multikulturalisme dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Beberapa referensi menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme dan toleransi (R'boul, 2021). Dalam Al-Qur'an, konsep multikulturalisme dapat ditemukan dalam beberapa ayat, seperti:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal." (QS. Al-Hujurat: 13)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوُكُوفُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. Ar-Rum: 22)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa keragaman manusia, baik dalam hal suku, ras, bahasa, maupun budaya, merupakan kehendak Allah SWT dan harus disikapi dengan sikap saling menghargai dan menghormati (Hambali, 2021). Selain itu, dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW juga terdapat banyak hadits yang menekankan pentingnya sikap toleransi dan multikulturalisme, yang berbunyi *"Sesungguhnya orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menolong bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dan demam."* (HR. Muslim) kemudian hadis lain yang berbunyi *"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan perbuatan kalian."* (HR. Muslim)

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan saling menghargai perbedaan (Burga & Damopolii, 2022). Beberapa prinsip multikulturalisme dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah antara lain:

1. Prinsip Kesetaraan (*al-Musawah*): Semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT.
2. Prinsip Kasih Sayang (*ar-Rahmah*): Islam mengajarkan untuk saling menyayangi dan peduli terhadap sesama.
3. Prinsip Keadilan (*al-'Adl*): Islam menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan.
4. Prinsip Toleransi (*at-Tasamuh*): Islam mengajarkan untuk bersikap toleran dan menghargai perbedaan.
5. Prinsip Persaudaraan (*at-Ta'aruf*): Islam menekankan pentingnya saling mengenal dan memahami satu sama lain (Masduki & Malikah, 2021).

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, Islam menjadi agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme dan dapat menjadi teladan bagi umat manusia dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran (Masduki & Malikah, 2021).

Penerapan Nilai-Nilai Multikultural oleh Para Khalifah

1. Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H / 632-634 M)

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dihadapkan pada tantangan menyatukan umat Islam yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menerapkan nilai-nilai multikultural dalam memimpin umat Islam pada masa awal kekhalifahan. Strategi Abu Bakar dalam menyatukan umat Islam yang beragam adalah dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang universal, seperti keadilan, persaudaraan, dan toleransi (Saputra, 2019). Beliau bermusyawarah dengan para pemimpin Muhajirin dan Anshar untuk membahas arah kebijakan yang akan diambil (Sari, 2023). Hal ini menunjukkan penghargaan Abu Bakar terhadap keberagaman dan pentingnya melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam menghadapi kelompok murtad dan perlawanan suku-suku, Abu Bakar menerapkan strategi yang tegas namun bijaksana. Beliau menggunakan metode "Bil Yad" (perperangan) untuk mempertahankan agama Islam, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kasih sayang (Yuriska, 2023). Kebijakan ini berhasil meredam perpecahan dan mempertahankan persatuan umat Islam. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, pendidikan Islam juga mendapat perhatian penting. Beliau mendorong pengembangan lembaga pendidikan seperti kuttub untuk mengajarkan membaca, menulis, dan nilai-nilai keislaman (Erfinawati et al., 2019). Hal ini menunjukkan komitmen Abu Bakar dalam menanamkan nilai-nilai multikultural melalui pendidikan.

Penerapan nilai-nilai multikultural oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dapat dilihat dari strategi beliau dalam menyatukan umat Islam yang beragam, kebijakan dalam menghadapi kelompok murtad dan perlawanan suku-suku, serta perhatian terhadap pengembangan pendidikan Islam. Pendekatan yang bijaksana, adil, dan toleran menjadi kunci keberhasilan Abu Bakar dalam memimpin umat Islam di masa awal kekhalifahan.

2. Masa Umar bin Khattab (13-23 H / 634-644 M)

Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, penerapan nilai-nilai multikultural dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan strategi yang diambil dalam mengelola wilayah-wilayah taklukan yang multi-etnis dan multi-religius. Pertama, Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang menghormati keberagaman agama dan budaya. Beliau membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa provinsi yang dikelola secara desentralisasi (Hardana, 2023). Hal ini memungkinkan penghormatan terhadap keragaman lokal dan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan konteks masing-masing daerah. Kedua, Umar bin Khattab memberikan perlindungan terhadap hak-hak non-Muslim (Ahlul Dzimmah) yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah dan adat istiadat mereka, serta dijamin keamanan dan harta bendanya (Wani et al., 2023). Kebijakan ini menunjukkan komitmen Umar dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan toleransi.

Ketiga, Umar bin Khattab mengembangkan sistem pendidikan Islam yang inklusif dan menghargai keberagaman. Beliau memerintahkan pembukaan lembaga-lembaga pendidikan seperti kuttub yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan masyarakat (Putra, 2023). Hal ini mencerminkan upaya Umar dalam menyebarkan nilai-nilai multikultural melalui pendidikan. Selain itu, Umar bin Khattab juga dikenal dengan kebijakan ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Beliau menerapkan sistem perpajakan (kharaj) yang memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat, serta mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga independen untuk mengelola keuangan negara (Almakki, 2018).

Kepemimpinan Umar bin Khattab menunjukkan penerapan nilai-nilai multikultural yang kuat dalam mengelola wilayah-wilayah taklukan yang beragam. Melalui sistem administrasi yang desentralistik, perlindungan hak-hak non-Muslim, pengembangan pendidikan yang inklusif, serta kebijakan ekonomi yang adil, Umar bin Khattab berhasil membangun masyarakat yang harmonis dan toleran di bawah naungan kekhalifahan Islam.

3. Masa Utsman bin Affan (23-35 H / 644-656 M)

Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, penerapan nilai-nilai multikultural dapat dilihat dari beberapa kebijakan ekonomi dan upaya mengatasi tantangan perpecahan akibat isu-isu tribalistik. Pertama, dalam bidang ekonomi, Utsman bin Affan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat yang beragam. Beliau memperluas distribusi kekayaan negara melalui program pemberian tanah dan bantuan kepada masyarakat miskin, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, atau agama (Akram, 2022). Hal ini menunjukkan komitmen Utsman dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kedua, Utsman bin Affan dihadapkan pada tantangan perpecahan akibat isu-isu tribalistik di kalangan umat Islam. Untuk mengatasi hal ini, Utsman menerapkan strategi yang menekankan pada persatuan dan persaudaraan. Beliau melakukan musyawarah dengan berbagai kelompok, mengedepankan dialog, dan berusaha meredam konflik dengan bijaksana (Salim, 2022).

Meskipun pada akhirnya Utsman menjadi korban pembunuhan, upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmennya dalam menjaga persatuan umat Islam. Selain itu, pada masa kepemimpinan Utsman, pengembangan pendidikan Islam juga mendapat perhatian penting. Beliau mendorong penulisan dan penyebaran Al-Qur'an secara masif, serta mendirikan lembaga-lembaga pendidikan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam (Musfira, 2021). Hal ini dapat dilihat sebagai upaya Utsman dalam menanamkan nilai-nilai multikultural melalui pendidikan. Kepemimpinan Utsman bin Affan menunjukkan penerapan nilai-nilai multikultural dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Meskipun menghadapi tantangan perpecahan, Utsman berupaya menjaga persatuan umat Islam dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang.

4. Masa Ali bin Abi Thalib (35-40 H / 656-661 M)

Pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penerapan nilai-nilai multikultural dapat dilihat dari upaya beliau dalam mengelola perbedaan pendapat di tengah umat Islam serta menjaga persatuan di tengah konflik internal yang muncul. Pertama, dalam mengelola perbedaan pendapat di tengah umat Islam, Ali bin Abi Thalib mengedepankan dialog dan musyawarah. Beliau berusaha meredam konflik dengan bijaksana, meskipun pada akhirnya harus menghadapi pemberontakan dari kelompok Khawarij (Anang & Husein, 2020). Hal ini menunjukkan

komitmen Ali dalam menjaga persatuan umat Islam di tengah keragaman pemikiran. Kedua, untuk menjaga persatuan di tengah konflik internal yang muncul, Ali bin Abi Thalib menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau menerapkan sistem distribusi pendapatan negara secara mingguan dan memprioritaskan prinsip keadilan (Saputra, 2023). Upaya ini diharapkan dapat meredam ketegangan sosial dan mempertahankan persatuan umat Islam.

Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pengembangan pendidikan Islam juga mendapat perhatian penting. Beliau mendirikan lembaga pendidikan khusus, seperti Asrama Ali bin Abi Thalib, yang bertujuan menanamkan nilai-nilai keislaman dan multikultural kepada generasi muda (Suratman et al., 2020). Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menunjukkan upaya yang komprehensif dalam mengelola perbedaan pendapat dan menjaga persatuan umat Islam di tengah konflik internal. Melalui pendekatan dialog, kebijakan ekonomi yang adil, serta pengembangan pendidikan Islam, Ali bin Abi Thalib berusaha mewujudkan masyarakat yang harmonis dan toleran.

Faktor Pendukung Terwujudnya Multikulturalisme

1. Prinsip Ajaran Islam tentang Keadilan dan Persaudaraan

Salah satu faktor utama yang mendukung terwujudnya multikulturalisme adalah prinsip ajaran Islam yang menekankan keadilan, persaudaraan, dan persamaan derajat manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan untuk saling membedakan (QS. Al-Hujurat: 13). Nilai ini menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan menghargai perbedaan. Para pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin menjadikan prinsip ini sebagai panduan dalam kebijakan mereka, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk kehidupan multikultural di tengah masyarakat yang beragam.

2. Kepemimpinan yang Adil dan Bijaksana

Kepemimpinan yang adil dan bijaksana juga menjadi faktor penting dalam mendukung multikulturalisme. Para Khulafaur Rasyidin dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim. Mereka tidak memihak kelompok tertentu dan selalu mempertimbangkan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pada masa Umar bin Khattab, perlindungan terhadap Ahlul Dzimmah (non-Muslim) dijalankan dengan penuh tanggung jawab, di mana hak-hak mereka dijamin selama mereka hidup di bawah pemerintahan Islam. Sikap kepemimpinan yang inklusif ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan di kalangan masyarakat yang beragam.

3. Sistem Hukum yang Menghormati Hak-Hak Minoritas

Faktor lain yang mendukung terwujudnya multikulturalisme adalah penerapan sistem hukum yang adil dan melindungi hak-hak minoritas. Pada masa Khulafaur Rasyidin, hukum Islam diterapkan dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan perlakuan yang sama bagi semua individu, terlepas dari latar belakang agama atau suku. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa hukum, keadilan ditegakkan tanpa memandang status sosial seseorang. Hal ini memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai.

4. Interaksi Sosial yang Harmonis di Tengah Keberagaman

Terciptanya interaksi sosial yang sehat dan harmonis di tengah keberagaman juga menjadi kunci dalam membangun kehidupan multikultural. Masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki tradisi musyawarah dan gotong royong yang mempererat hubungan antarindividu maupun antarkelompok. Perbedaan budaya, bahasa, dan agama tidak menjadi penghalang untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bagaimana interaksi yang positif dapat menjadi sarana untuk membangun rasa saling pengertian dan toleransi (Yani et al., 2020).

Dampak Kebijakan Multikultural pada Stabilitas Sosial

Penerapan kebijakan multikultural dalam pemerintahan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial di masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan multikultural dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keharmonisan dan mencegah konflik di tengah keragaman masyarakat (Nafiah, 2023). Pertama, kebijakan multikultural yang menghormati hak-hak minoritas dan menjamin kesetaraan dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sarjito, 2023). Hal ini dapat mencegah timbulnya

ketegangan sosial dan membantu mewujudkan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Kedua, implementasi nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerjasama antar kelompok melalui kebijakan multikultural dapat memperkuat kohesi sosial dan mempererat ikatan antar warga. Kondisi ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat (Lahera & Dewi, 2021). Namun, kebijakan multikultural juga dapat menghadapi tantangan, seperti adanya resistensi dari kelompok-kelompok yang menginginkan homogenitas atau merasa terancam oleh keberagaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengelola perbedaan dan memperkuat pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap keragaman (Tobroni, 2021). Selain itu, penegakan hukum yang adil dan efektif serta perlindungan hak-hak warga negara juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman. Kebijakan multikultural harus didukung oleh sistem hukum yang kuat dan responsif terhadap isu-isu keberagaman (Izzaty, 2020).

SIMPULAN

Nilai-nilai multikulturalisme telah diterapkan secara nyata pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yang meliputi periode Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Prinsip-prinsip seperti keadilan, toleransi, persaudaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman agama serta budaya berhasil menjadi landasan kuat dalam mengelola masyarakat multietnis dan multireligius. Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, strategi kepemimpinan yang bijaksana dan tegas berhasil menyatukan umat Islam yang beragam, sementara Umar bin Khattab mengukuhkan sistem administrasi yang inklusif dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak non-Muslim. Di masa Utsman bin Affan, perhatian terhadap keadilan ekonomi dan penyebaran Al-Qur'an menjadi langkah penting dalam memperkuat persatuan umat. Selanjutnya, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menunjukkan upaya meredam konflik internal melalui dialog dan musyawarah.

Penerapan nilai-nilai multikultural tersebut membuktikan bahwa Islam, sejak awal, telah menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang dalam menyikapi keberagaman. Kepemimpinan para khalifah menjadi teladan dalam membangun harmoni di tengah perbedaan, yang relevan untuk diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan multikultural di era modern.

REFERENSI

- Akram, M. (2022). Ekonomi pada masa khulafaurasyidin.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/upv45>
- Al-Hikami, F. J., Ardiansyah, D., & Basuki, B. (2023). Moderasi beragama dalam kerajaan islam: memahami multikulturalisme dan peradaban islam. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(3), 325-332. <https://doi.org/10.60132/jip.v1i3.127>
- Almakki, A. (2018). Kebijakan ekonomi umar bin khattab. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.14>
- Anang, A. A. and Husein, A. (2020). Genealogi aliran-aliran politik dalam islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 4(2), 68-79. <https://doi.org/10.29408/fhs.v4i2.2592>
- Burga, M. and Damopolii, M. (2022). Reinforcing religious moderation through local culture-based pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145-162. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19879>
- Eka Hardana, N. and Kholiq, A. (2023). Social benefit system during the government omar ibn khattab. *Jurnal Legisci*, 1(1), 43-56. <https://doi.org/10.62885/legisci.v1i1.16>
- Fitrah Sugiarto (2023). Pendidikan multikultural dalam perspektif agama-agama perspektif agama-agama. *ISEDU : Islamic Education Journal*, 1(1), 31-46. <https://doi.org/10.59966/isedu.v1i1.307>
- Hambali, K. (2021). Islamic perspective on the concepts of interaction among multicultural society. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 23(2), 249-274. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol23no2.7>
- Herawati, E., Habibie, M. R., & Kusumaningtyas, R. (2021). Relevansi pendidikan multikulturalisme nabi muhammad dalam konteks keindonesiaan : spirit profetik dalam mengelola keragaman di basis masyarakat multikultural. *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(2), 1-42. <https://doi.org/10.51311/nuris.v8i2.306>
- Izzaty, R. (2020). Urgensi ketentuan carry-over dalam pembentukan undang-undang di indonesia. *Jurnal HAM*, 11(1), 85. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>

- Lahera, T. and Dewi, D. A. (2021). Hak asasi manusia : pentingnya pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di indonesia saat ini. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 90-97. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055>
- Masduki, M. and Malikah, N. (2021). Dasar teologis pendidikan islam multikultural. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 1(2), 28-35. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.748>
- Mulyadi, Diah Sartika, Hasrian Rudi Setiawan, R. (2023). Pendidikan agama islam sebagai sarana membentuk identitas keagamaan dalam masyarakat multikultural. *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, 90-99. <https://doi.org/10.51178/khazanah.v2i3.1554>
- Musfira, A. (2021). Tugas 1 sejarah pemikiran ekonomi islam (ainun musfira 90100118005).. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ythfz>
- Nafiah, S. N. W. and Kuncoro, R. (2023). Perlindungan hak asasi anak dari perkawinan sedarah (incest) dalam tata hukum indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 82-94. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2285>
- Putra, R. (2023). Analisis kebijakan pendidikan era khullafah rasyidin. *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 1(1), 32-40. <https://doi.org/10.61683/isme.vol11.2023.32-40>
- R'boul, H. (2021). Alternative theorizing of multicultural education: an islamic perspective on interculturality and social justice. *Journal for Multicultural Education*, 15(2), 213-224. <https://doi.org/10.1108/jme-07-2020-0073>
- Salim, D. P. (2022). Politics and islamic laws in indonesia (case study of muslim prayer procedures during the covid-19 pandemic). *Mazahib*, 21(2), 187-212. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5060>
- Saputra, M. (2023). Penerapan kebijakan fiskal khalifah ali bin abi thalib dalam pendistribusian pendapatan negara di indonesia. *Al-Ittifaq Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i2.10304>
- Sarjito, A. (2023). Sinkronisasi kebijakan pertahanan dalam operasi militer dengan hak asasi manusia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 3(2), 17-41. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v3i2.437>
- Suratman, S., Andas, M., Syahril, S., & Hadi, P. (2020). Eksistensi kurikulum diniyah santri asrama ali bin abi thalib di smp it madina samarinda. *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, 1(3), 191-201. <https://doi.org/10.21093/jtikborneo.v1i3.2323>
- Tobroni, F. (2021). Untitled. *Al-Ahkam*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4631>
- Wani, S., Qadri, S., & Wani, B. (2023). The legal status of religious minorities in islam: a historical perspective. *Hamdard Islamicus*, 46(1). <https://doi.org/10.57144/hi.v46i1.497>
- Yani, M., Suyanto, T., Ridlwan, A. A., & Febrianto, N. F. (2020). Islam dan multikulturalisme: urgensi, transformasi, dan implementasi dalam pendidikan formal. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 8(1), 59-74. <https://doi.org/10.15642/jpai.2020.8.1.59-74>